

## BAB II

### FENOMENA ANAK *UNDOCUMENTED* INDONESIA DI MALAYSIA 2022- 2025

Pada Bab II akan dibahas berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan topik penelitian mengenai dinamika pekerja migran Indonesia dan anak *undocumented*. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait isu yang terkait dengan anak migran di Malaysia dan situasi yang terjadi pada anak *undocumented*.

#### 2.1 Gambaran Umum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Sejarah migrasi Indonesia ke Malaysia telah ada sejak masa kolonial pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, peristiwa ini terjadi karena kedekatan wilayah etnis seperti Bugis, Jawa, Banjar, dan Minang yang banyak menetap di wilayah Semenanjung Malaysia yang disebabkan karena adanya daerah perdagangan dan pelayaran tradisional di Selat Malaka. Pada masa ini migrasi belum disebut sebagai “pekerja migran” namun hanya perpindahan sosial dan ekonomi antar wilayah melayu. Tahun 1970 yang menjadi awal migrasi tenaga kerja modern akibat dari *New Economic Policy*. Dengan kebijakan tersebut pekerja migran Indonesia mulai masuk secara terstruktur dalam sektor konstruksi dan ekspansi perkebunan sawit, pekerja migran yang masuk pada gelombang migrasi awal ke Malaysia tidak didominasi pekerja profesional. Terdapat kemajuan kualitas migran pada akhir tahun 1980 migran

Indonesia yang menuju Malaysia dengan status *semi-skilled* seperti teknisi, operator mesin, dan mekanik.<sup>48</sup>

Pada tahun 1990 terjadi lonjakan besar hingga 367.801 pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena Malaysia mengadopsi kebijakan imported labor untuk menunjang sektor manufaktur dan jasa.<sup>49</sup> Pada masa ini Indonesia menjadi penyumbang migran terbesar di Malaysia, selain itu permasalahan terkait pekerja migran ilegal atau nonprosedural juga muncul pada masa 1990 yang disebabkan oleh perekrutan informal melalui jalur keluarga atau teman, pengawasan perbatasan yang lemah, dan permintaan pekerja murah dari majikan. Sejak masa 1990 juga muncul istilah Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Malaysia dan Pekerja Migran Ilegal (PMI non-prosedural) Indonesia. Sehingga Malaysia mulai menerapkan regulasi ketat dan operasi penertiban imbas dari melonjaknya jumlah migran ilegal atau pekerja migran non-prosedural.<sup>50</sup>

Sejak awal 2000an migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia mengalami normalisasi yang ditandai dengan peningkatan arus migrasi yang bersifat berkelanjutan serta dominasi pekerja perempuan. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari feminisasi

---

<sup>48</sup> Muhammad Farhan Fernandi and R. Suharso, "Migrasi Tiga Gelombang: Jejak Wong Cilik Klaten Di Singapura Tahun 1920-1980.," *Journal of Indonesian History* 10, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>49</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Emigrants from Indonesia: Where Did They Move To?," *Our World in Data*, 2024, <https://ourworldindata.org/explorers/democracy?country=~ARM&pickerSort=asc&pickerMetric=entityName&Dataset=Varieties+of+Democracy&Metric=Electoral+democracy&Sub-metric=Main+index>.

<sup>50</sup> Raja Eben Lumbanrau, "Migrasi Tradisional NTT Ke 'rumah Kedua' Malaysia, Sejarah 'Tangis Dan Tawa' Selama Puluhan Tahun," *BBC News Indonesia*, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057506>.

migrasi yang terlihat sejak pertengahan 1980 ketika jumlah pekerja migran perempuan mulai melampaui laki-laki.<sup>51</sup> Data menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 78 persen dari total penempatan pekerja migran Indonesia merupakan perempuan dengan mayoritas bekerja di sektor domestik yang telah menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia.<sup>52</sup> Permintaan terhadap pekerja rumah tangga Indonesia meningkat tajam hal ini ditunjukkan dari jumlah pekerja domestik yang naik dari sekitar 111.755 orang pada periode 1997 menjadi 320.044 orang pada tahun 2005.<sup>53</sup> Kondisi ini memperkuat pembentukan koridor migrasi Indonesia-Malaysia sebagai salah satu jalur migrasi tenaga kerja terbesar di kawasan Asia Tenggara.<sup>54</sup>

Pada periode 2006 hingga 2014 migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia menunjukkan diversifikasi sektor pekerjaan selain sektor domestik, pekerja migran Indonesia semakin banyak terserap di sektor perkebunan pada periode 2000-2005 terjadi kenaikan yang semula pada tahun 2000 terdapat pekerja migran Indonesia di sektor perkebunan sebanyak 186.000 pada 2005 meningkat pesat di angka 383.184, terutama di wilayah Malaysia Timur dan Semenanjung Malaysia.<sup>55</sup> Pada fase ini sistem

---

<sup>51</sup> Graeme Hugo, "Effects of International Migration on the Family in Indonesia," in *International Migration and the Family in Asia*, ed. Graeme Hugo, Siaw-Ean Khoo, and Peter McDonald (New York: United Nations, 2002), 160-161.

<sup>52</sup> International Organization for Migration, "Labour Migration from Indonesia: An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle East" (Jakarta, 2010).

<sup>53</sup> Rohani Ariffin, "Domestic Work and Servitude in Malaysia," Hawke Institute Working Paper Series (Magill, South Australia, 2001).

<sup>54</sup> Ernst Spaan and Ton van Naerssen, "Migration Decision-Making and Migration Industry in the Indonesia-Malaysia Corridor," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no. 4 (2017): 680-95, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1315523>.

<sup>55</sup> Graeme Hugo, "Indonesia's Labor Looks Abroad," *Migration Information Source*, 2007, <https://www.migrationpolicy.org/article/indonesias-labor-looks-abroad>.

perekrutan dan penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia dan Malaysia telah stabil sehingga memungkinkan terjadinya migrasi sirkuler dengan kontrak kerja dua tahun yang dapat diperpanjang secara berulang. Pola ini mendorong pekerja migran khususnya perempuan untuk tinggal dalam jangka waktu panjang di negara tujuan.<sup>56</sup> Menurut *migrant care* terdapat lebih dari 1 juta pekerja migran Indonesia tinggal di Malaysia pada periode ini baik melalui jalur formal maupun informal.<sup>57</sup>

Sejak pertengahan 2010an, migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia memasuki fase pengetatan yang ditandai dengan penurunan relatif penempatan resmi terutama di sektor pekerja rumah tangga. Penurunan ini dipengaruhi oleh moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Malaysia pada tahun 2009 serta penerapan Mou 2011 yang memperketat persyaratan perekrutan dan membatasi ruang lingkup pekerjaan PRT Indonesia.<sup>58</sup> Data menunjukkan bahwa jumlah penempatan pekerja rumah tangga Indonesia ke Malaysia mengalami penurunan dari 300.957 orang pada tahun 2007 menjadi 230.141 pada 2009 dan kembali turun menjadi 134.733 pada 2011.<sup>59</sup> Meskipun terjadi pengetatan hal ini tidak menghentikan migrasi secara keseluruhan. Arus migrasi informal tetap berlangsung melalui jaringan migrasi

---

<sup>56</sup> Graeme Hugo, "What We Know About Circular Migration and Enhanced Mobility," Migration Policy Institute Policy Brief (Washington, DC, 2013), <https://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-circular-migration-and-enhanced-mobility>.

<sup>57</sup> Kenji Kimura, "Transnational System of Care and Women's Labour Migration: A Study of Indonesian Domestic Workers to and in Malaysia Kenji Kimura" (Erasmus University Rotterdam, 2021). Hal 129

<sup>58</sup> Sharuna Balakrishnan, "Circular Migration of Indonesian Low-Skilled Labour Migrants to Peninsular Malaysia: Patterns, Causes and Consequences" (University of Adelaide, 2013).

<sup>59</sup> Ibid.

transnasional, seiring dengan tingginya permintaan tenaga kerja domestik di Malaysia dan keterbatasan alternatif pekerjaan bagi calon migran di Indonesia.<sup>60</sup>

**Tabel 4.1 Regulasi dan Operasi Penertiban Malaysia**

Tahun	Operasi atau Regulasi	Keterangan
1992	Ops Nyah I	Deportasi terhadap 40.000 migran Indonesia yang tidak melakukan pendaftaran wajib. Setelah tenggat waktu pendaftaran yang diberikan telah habis.
1997	Ops Nyah II	Lanjutan dari Ops Nyah II dengan kebijakan yang lebih tegas tanpa adanya pemulangan sukarela terhadap migran ilegal, penyelundupan manusia, dan pemberi kerja.
1998	Ops Nyah III	Pada Ops Nyah yang ketiga personil yang dikerahkan lebih banyak dari pada sebelumnya seperti Kepolisian, Angkatan Darat, Bea Cukai, Angkatan Laut, dan Imigrasi. Penjagaan ketat di wilayah Selat Malaka meliputi darat, laut, dan udara.
2005	Ops Tegas	Pada Ops Tegas migran di tangkap dan di deportasi serta dipersilahkan untuk bisa pulang lalu mengurus dokumen agar bisa masuk kembali ke Malaysia. Terdapat 400.000 migran yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, Bangladesh, India, dan Sri Lanka.
2011	Ops 6P	Ops 6P merupakan program amnesti yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia yang di dalamnya meliputi tentang Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan, dan Pengusiran. Dalam program Ops 6P migran diberikan waktu untuk

<sup>60</sup> Joseph Chinyong Liow, "Malaysia's Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: In Search of Solutions," *Contemporary Southeast Asia* 25, no. 1 (2003): 44-64.

Tahun	Operasi atau Regulasi	Keterangan
		mendaftarkan legalitasnya sebelum ada tindakan hukum.

*Sumber: Low, 2020<sup>61</sup>*

Tabel diatas menunjukkan siklus operasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dalam menertibkan Pekerja Migran. Pemerintah Malaysia tetap memiliki kebutuhan tenaga kerja migran dan untuk mengontrol Malaysia melakukan penertiban secara berkala. Terdapat tiga fase operasi pekerja migran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Fase pertama adalah Ops Nyah I-III yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 1992-1998, fokus utama operasi tersebut adalah menertibkan pekerja migran ilegal melalui deportasi massal untuk menjaga keamanan negara, karena migrasi dianggap sebagai ancaman kemanan, selain itu Malaysia belum memiliki sistem migrasi tenaga kerja yang matang.<sup>62</sup>

Fase kedua adalah Ops Tegas yang dilakukan pada tahun 2005, operasi yang dilakukan pada tahun 2005 bersifat tegas namun fungsional, berbeda dengan Ops Nyah yang fokus terhadap deportasi massal tanpa ada kesempatan untuk kembali ke Malaysia. Pada Ops Tegas pemerintah Malaysia memulangkan pekerja migran ilegal untuk mengurus legalitas migran sehingga memperbolehkan migran untuk kembali secara legal.<sup>63</sup>

---

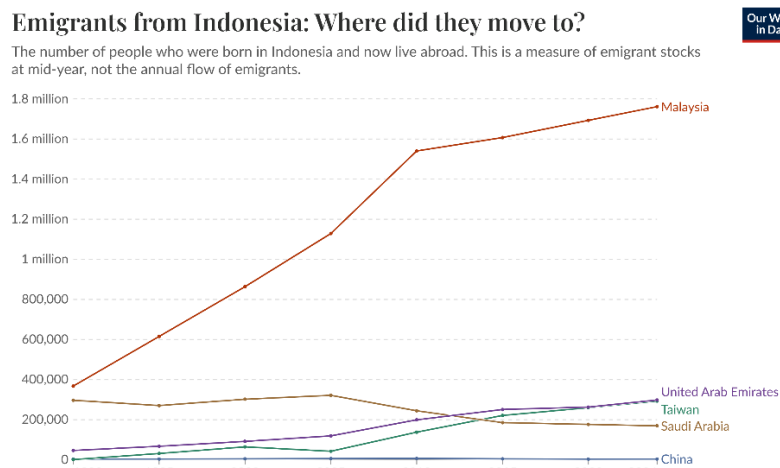
<sup>61</sup> Choo Chin Low, "Migrasi Ilegal Di Malaysia: Amnesti Dan Repatriasi Sukarela," *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences* 81 (2020): 153–58, <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.03.03.19>.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

Fase ketiga adalah Ops 6P yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan fokus utama operasi tersebut adalah legalisasi dan tata kelola. Program yang ada pada Ops 6P meliputi Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan, dan Pengusiran. Operasi yang dilakukan pada tahun 2011 memberikan ruang bagi migran yang statusnya ilegal untuk mengurus legalitas sebelum dilakukannya penertiban.<sup>64</sup> Dari penertiban yang dilakukan Malaysia melalui Ops 6P telah terjaring 1.303.126 migran legal dengan komposisi dari keseluruhan yaitu Indonesia sebanyak (49,1%), Bangladesh (20,5%), Myanmar (11%), India (4%), Filipina (3,7%).<sup>65</sup>

**Gambar 2.1 Migran yang Pindah dari Indonesia ke Negara Lain**



Sumber: *Our World in Data 2024*<sup>66</sup>

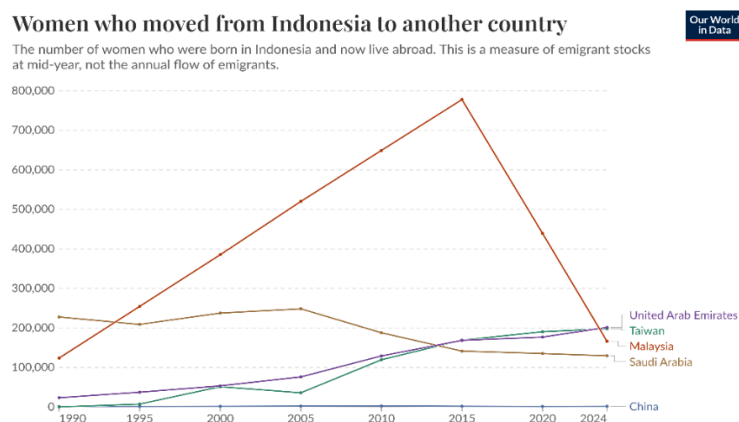
<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Low Choo Chin, "Amnesty for Undocumented Migrants in Malaysia: Policy Development and Implementation since 2011," *Malaysia and International History Review* 6, no. 1 (2024): 1–19.

<sup>66</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Emigrants from Indonesia: Where Did They Move To?"

Data *Our World in Data* menunjukkan bahwa Malaysia menjadi negara tujuan utama migran asal Indonesia sejak awal 1990 hingga tahun 2024. Jumlah penduduk kelahiran Indonesia yang berada di Malaysia mengalami peningkatan yang signifikan, dari 367.801 orang pada tahun 1990 menjadi 1,8 juta orang pada tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tujuan lainnya seperti Uni Emirat Arab, Taiwan, dan Arab Saudi. Peningkatan yang cukup signifikan menunjukkan migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia tidak bersifat sementara, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan memberntuk komunitas migran yang relatif menetap. Kondisi migrasi yang berskala besar dan berkelanjutan ini pada akhirnya membentuk konteks struktural dalam kehidupan sosial pekerja migran Indonesia di Malaysia.

**Gambar 2.2 Data Perempuan yang Pindah dari Indonesia ke Negara Lain**

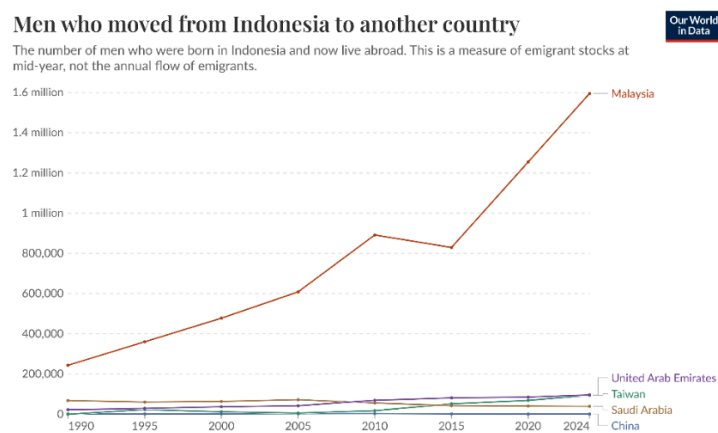


Sumber: *Our World in Data* 2024<sup>67</sup>

<sup>67</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Women Who Moved from Indonesia to Another Country," Our World in Data, 2024,

Data *Our World in Data* menunjukkan bahwa jumlah perempuan Indonesia yang berada di Malaysia mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 1990 hingga berada di puncak pada tahun 2015 dengan jumlah 777.848 orang.<sup>68</sup> Lonjakan yang terjadi dipengaruhi oleh feminisasi migrasi dengan meningkatnya permintaan kebutuhan untuk pekerjaan di sektor informal seperti asisten rumah tangga dan perawat lansia atau anak. Akumulasi perempuan migran yang telah menetap dalam jangka waktu yang lama memiliki kontribusi terhadap pembentukan keluarga sehingga menjadi salah satu penyebab munculnya anak *undocumented* di Malaysia.<sup>69</sup>

**Gambar 2.3 Data Laki-laki yang Pindah dari Indonesia ke Negara Lain**



Sumber: *Our World in Data 2024*<sup>70</sup>

<https://ourworldindata.org/explorers/democracy?country=~ARM&pickerSort=asc&pickerMetric=entityName&Dataset=Varieties+of+Democracy&Metric=Electoral+democracy&Sub-metric=Main+index>.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Kimura, "Transnational System of Care and Women's Labour Migration: A Study of Indonesian Domestic Workers to and in Malaysia Kenji Kimura." Hal 129.

<sup>70</sup> United Nations Department of Economic and Social Affairs, "Men Who Moved from Indonesia to Another Country," *Our World in Data*, 2024, <https://ourworldindata.org/explorers/migration->

Data *Our World in Data* menunjukkan bahwa jumlah migran laki-laki yang berasal dari Indonesia yang tinggal di Malaysia meningkat dari 243.921 orang pada tahun 1990 menjadi 1.594.995 pada tahun 2024. Sejak tahun 1990 hingga 2010 dominasi laki-laki yang pindah ke Malaysia naik secara stabil karena permintaan di sektor formal sehingga di dominasi laki-laki, namun menuju tahun 2015 menunjukkan penurunan hal ini dipengaruhi oleh perpindahan sektor informal yang didominasi oleh perempuan.<sup>71</sup>

Pekerja migran Indonesia di Malaysia meliputi pekerja laki-laki dan perempuan yang tersebar dalam berbagai sektor seperti konstruksi, perkebunan, manufaktur, dan sektor informal seperti pekerjaan rumah tangga. Kemiripan budaya dan bahasa menjadi faktor unggulan pekerja migran Indonesia memilih Malaysia karena memudahkan adaptasi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan di Malaysia. Tetapi tidak semua PMI bekerja dengan jalur resmi terdapat kelompok yang bekerja melalui jalur nonprosedural atau ilegal yang menghadapi resiko tinggi terhadap perlindungan hak dan terbatasnya akses layanan dasar. Berikut data pekerja migran yang ada di Malaysia dibagi dalam dua sektor yaitu formal dan informal.<sup>72</sup>

---

flows?tab=line&time=1990..2024&Country=Indonesia&Metric=Emigrants%3A+People+moving+away+from+country&Gender=Male+migrants&country=~MYS.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Kimura, "Transnational System of Care and Women's Labour Migration: A Study of Indonesian Domestic Workers to and in Malaysia Kenji Kimura." Hal 8

**Gambar 2.4 Data Penempatan PMI menurut sektor**



Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia<sup>73</sup>

Menurut Badan Pekerja Migran Indonesia Penempatan PMI di sektor informal berada di atas sektor formal dari 2008 hingga menyentuk titik tertinggi pada tahun 2011 dengan jumlah sekitar 330-340 ribu dan tetap dominan hingga tahun 2014.<sup>74</sup> Sektor informal merupakan pekerjaan yang rentan tidak terdokumentasi karena bekerja di bidang rumah tangga atau perkebunan sehingga beresiko melahirkan anak tanpa pencatatan kelahiran. Pada 2015 hingga 2020 kedua sektor formal dan informal mengalami penurunan namun informal masih cukup tinggi dibanding sektor formal. Setelah masa pandemi *Covid-19* penempatan formal meningkat dan regulasi diperketat.

<sup>73</sup> Ade Putri Inayati, Audrey Rachalia Achmad, and Muhammad Hardi Saputra, *PROYEKSI Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024-2026* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2023), [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_26-11-2019\\_data\\_12-03-2019\\_094615\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_2018.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf).

<sup>74</sup> Ibid.

PMI informal yang sudah terlanjur tinggal lama cenderung tetap bertahan secara *undocumented*, sehingga anak-anak yang lahir pada periode ini tetap berstatus tidak berdokumen meskipun arus penempatan baru menurun.<sup>75</sup>

Indonesia telah menjadi bagian penting dari pemasok pekerja migran ke Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terdapat ketidakstabilan naik dan turun jumlah pekerja migran Indonesia pada periode 2022 hingga 2025 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, regulasi, serta pandemi Covid-19.

**Gambar 2.5 Jumlah PMI di Malaysia 2022-2025**



*Sumber: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)<sup>76</sup>*

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (Jakarta, 2025), <http://www.bp2mi.go.id>.

Berdasarkan data tabel diatas pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia pada tahun 2022 hingga 2025 mengalami pola fluktuatif karena terdapat dinamika perpindahan tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 2022 jumlah PMI mencapai 43.125 orang, lalu mengalami peningkatan di tahun 2023 hingga mencapai puncak 72.257 orang. Namun terdapat penurunan yang signifikan di tahun 2024 menjadi 51.723 orang, dan kembali menurun pada Januari hingga Agustus tahun 2025 yaitu 32.330 orang.<sup>77</sup>

Flaktuasi yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perubahan kebijakan tenaga kerja di negara tujuan, ketatnya regulasi imigrasi Malaysia, dampak Covid-19 yang masih berlanjut di beberapa sektor, serta kondisi ekonomi global pasca Covid-19 yang menyebabkan turunnya permintaan tenaga kerja migran. Berdasarkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjelaskan bahwa kenaikan pesat pada tahun 2023 dikarenakan pelanggaran kebijakan pascapandemi dan peningkatan kebutuhan tenaga kerja terutama pada sektor informal seperti perkebunan dan jasa rumah tangga.<sup>78</sup> Penurunan jumlah pada tahun 2024 dan 2025 dipengaruhi oleh faktor ketatnya mekanisme penempatan pekerja migran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui skema prosedural dan pengendalian pada pekerja migran nonprosedural. Penurunan drastis pada tahun 2025 merupakan dampak dari kebijakan proteksi yang lebih ketat dari sebelumnya dan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *BP2MI* (Jakarta, 2024).

terdapat kemungkinan bahwa turunnya permintaan kerja di sektor informal di Malaysia yang sering mempekerjakan pekerja migran Indonesia nonprosedural.<sup>79</sup>

Dinamika migrasi PMI ke Malaysia yang berlangsung dalam jangka panjang serta kebijakan penertiban dan pembatasan imigrasi memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Salah satu dampak dari lonjakan jumlah pekerja migran Indonesia adalah keberadaan anak-anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan migran yang sampai saat ini belum jelas status hukumnya. Kelompok anak-anak yang lahir dari pekerja migran disebut sebagai anak *undocumented*.<sup>80</sup>

## **2.2 Permasalahan Anak *Undocumented***

Ketiadaan dokumen identitas merupakan permasalahan utama yang di hadapi oleh anak-anak *undocumented* di Malaysia, termasuk anak-anak migran Indonesia. Pemerintah Malaysia secara resmi menyatakan bahwa tidak memiliki data khusus terkait jumlah individu *undocumented*, karena sistem administrasi kependudukan hanya membedakan antara warga negara dan non warga negara.<sup>81</sup> Pada 2016 mantan Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi melaporkan bahwa terdapat 290.437 anak yang lahir di Malaysia tanpa kewarganegaraan Malaysia dengan

---

<sup>79</sup> BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," 2025.

<sup>80</sup> Rafli Jassika Aranda and Nurhimiliah, "Tanggung Jawab Kedutaan Besar Republik Indonesia Dalam Mengakomodasi Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 13544–52.

<sup>81</sup> Ida Lim, "Why Malaysia Has Zero Data on Stateless Persons\_ Decoding the Official View through Parliament's Lens - Malay Mail," *malaymail*, 2023, <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2023/07/11/why-malaysia-has-zero-data-on-stateless-persons-decoding-the-official-view-through-parliaments-lens/78931>.

kelompok terbesar berasal dari keturunan Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Angka tersebut kembali dikonfirmasi pada sidang Dewan Negara pada Oktober 2016 bahwa pencatatan kelahiran dilakukan berdasarkan kewarganegaraan orang tua bukan etnisitas.<sup>82</sup>

Salah satu dampak dari kondisi *undocumented* adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan. Hingga 30 Juni 2023, tercatat hanya 8.575 anak *undocumented* yang berhasil terdaftar di sekolah negeri dan sekolah bantuan pemerintah di seluruh Malaysia.<sup>83</sup> Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak *undocumented* yang dapat mengakses pendidikan formal. Menurut laporan tahun 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 300.000 anak di Malaysia pernah ditolak akses pendidikan akibat dari ketiadaan dokumen hukum yang sah.<sup>84</sup> Data pada 2024 menunjukkan bahwa hanya 10.076 anak *undocumented* yang terdaftar di sekolah negeri, menunjukkan bahwa hambatan struktural terhadap pendidikan masih sangat kuat.<sup>85</sup>

Permasalahan status hukum juga terlihat dalam tingginya angka permohonan kewarganegaraan dari kelompok non warga negara. Sepanjang periode 2012-2020, *National Registration Department* (NRD) Malaysia menerima 145.768 permohonan

---

<sup>82</sup> Amjad Rabi et al., "Wasted Potential: The Economic Case for Educating Non-Citizen Children Born in Malaysia in an Aging Nation," Policy Paper Series (Kuala Lumpur, Malaysia, 2025). Hal 5

<sup>83</sup> Maximus, "8,500 Undocumented Children in Malaysian Schools," *nasilemakdaily.com*, 2025, <https://nasilemakdaily.com.my/undocumented-children-malaysian-schools/>.

<sup>84</sup> Afrina Arfa, "Born Here, Belonging Nowhere: Stateless Children in Malaysia," Taylor's College, 2024, <https://college.taylors.edu.my/en/student-life/news/2024/born-here-belonging-nowhere-stateless-children-in-malaysia.html>.

<sup>85</sup> Rabi et al., "Wasted Potential: The Economic Case for Educating Non-Citizen Children Born in Malaysia in an Aging Nation." Hal 8

kewarganegaraan dari non warga negara dengan tingkat persetujuan hanya sekitar 23 persen. Dari jumlah permohonan yang disetujui terdapat 14.777 dengan persentase 44% berasal dari keturunan Indonesia, menjadikan kelompok ini yang terbesar. Selain itu hampir 39% dari seluruh permohonan tersebut di ajukan oleh anak-anak.<sup>86</sup>

Isu anak *undocumented* menjadi perhatian di Malaysia terjadi sejak tahun 2001 saat kebijakan Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan di buat oleh pemerintah Malaysia. Perdana Menteri pada saat itu menyebutkan bahwa pekerja migran yang tidak memiliki dokumen atau pekerja migran ilegal merupakan kelompok yang mengancam keamanan nasional dan harus di deportasi karena tidak memiliki hak untuk bisa berada di Malaysia. Kebijakan Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan tahun 2001 memperkecil akses anak-anak *undocumented* untuk bisa bersekolah, terdapat batasan untuk bisa bersekolah di sekolah kebangsaan Malaysia sehingga berada di posisi yang terpinggirkan dari akses pendidikan. Sebelum adanya kebijakan terkait Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan pekerja migran Indonesia masih bisa bebas bekerja dan anak-anak *undocumented* bisa bersekolah di kebangsaan Malaysia walaupun tidak memiliki dokumen yang legal. Hingga tahun 2010 Indonesia terus memperjuangkan hak pendidikan yang seharusnya anak-anak PMI bisa akses, pemerintah Indonesia melalui KBRI membuat Sekolah Indonesia untuk anak-anak PMI, namun sekolah

---

<sup>86</sup> Lim, "Why Malaysia Has Zero Data on Stateless Persons\_ Decoding the Official View through Parliament's Lens \_ Malay Mail."

tersebut hanya bisa di akses oleh anak-anak yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti akta lahir dan kartu pelajar.<sup>87</sup>

Malaysia sebagai negara tujuan para pekerja migran telah menyatakan peraturan yang berisi tentang larangan terkait pernikahan yang dilakukan sesama pekerja migran terutama dibidang kerja non-profesional seperti *housemaid* dan pekerja buruh, selain itu para pekerja migran juga dilarang untuk membawa serta keluarganya ke Malaysia, namun pada kenyataannya banyak terjadi pernikahan yang dilakukan oleh sesama pekerja migran hingga menghasilkan anak yang terlahir di Malaysia.<sup>88</sup> Anak yang lahir dari sesama pekerja migran kerap menemukan banyak masalah terkait status nya yang tidak diakui oleh negara tempat tinggal, dengan status anak tersebut yang tidak terdaftar oleh sistem administrasi negara otomatis menempatkan anak tersebut pada posisi yang rentan karena tidak dapat mengakses hak-hak mereka seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan publik. Kebijakan yang dibuat oleh Malaysia untuk anak migran yang lahir harus di daftarkan ke sistem administrasi negara, pada kenyataannya anak-anak yang lahir berasal dari orang tua yang bekerja secara non-prosedural atau ilegal. Orang tua yang posisinya adalah pekerja ilegal lebih memilih untuk tidak mengurus dokumen kependudukan yang seharusnya anak tersebut dapatkan karena terdapat ancaman deportasi apabila status mereka diketahui oleh pemerintah setempat.

---

<sup>87</sup> Hana Novia, "Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sarawak Malaysia," *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 15, no. 2 (2023): 1–22, <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/8393>.

<sup>88</sup> Agus Setiawan, "WNI Bersuamikan Orang Malaysia Disarankan Laporan Perkawinan Ke Mahkamah," ANTARA News, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2504349/wni-bersuamikan-orang-malaysia-disarankan-lapor-perkawinan-ke-mahkamah>.

Anak-anak pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi menghadapi banyak permasalahan signifikan untuk bisa mengakses hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu terdapat ancaman yang ada disekitar mereka seperti diskriminasi oleh warga lokal, eksploitasi, hingga perdagangan manusia. Kondisi yang dialami oleh anak *undocumented* butuh perhatian yang serius oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan demi menjamin hak-hak mereka sesuai dengan Konvensi Hak Anak.<sup>89</sup>

Menurut *United Nations Children's Funds* terdapat 9 juta anak di bawah usia 5 tahun yang kelahirannya tidak didaftarkan dalam rentang tahun 2010 hingga 2020. Salah satu penyebab banyaknya anak yang tidak memiliki dokumen kependudukan adalah pekerja migran yang berstatus ilegal, ketidakjelasan hukum pekerja migran memiliki dampak langsung terhadap anak yang lahir.<sup>90</sup> Kondisi anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat atau tidak diakui oleh negara tempat tinggal menempatkan anak tersebut pada status yang tidak diakui oleh hukum. Pernikahan yang dilakukan antara pekerja migran harus diakui dan dilaporkan ke KBRI agar status pernikahan bisa dianggap sah, apabila tidak melakukan pelaporan pada pihak pemerintah maka status pernikahan tidak bisa diakui atau legal. Status pernikahan menjadi penting untuk anak yang lahir di tempat pekerja migran bekerja, karena

---

<sup>89</sup> Hari Sri Anggraeni, Mohamad Tohari, and Tri Susilowati, "Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia Di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Dan Hukum Malaysia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5 NOMOR 2 (2025): 768–81, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

<sup>90</sup> United Nations Children's Fund, "A STATISTICAL PROFILE OF BIRTH REGISTRATION IN ASIA AND THE PACIFIC" (New York, NY, USA, 2021).

mempengaruhi identitas anak dan hak-hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan. Ancaman dari pernikahan yang tidak tercatat adalah lahirnya anak-anak *undocumented* yang berada pada kondisi terancam karena tidak memiliki dokumen ataupun identitas yang diakui untuk bisa mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>91</sup>

Kendala administrasi merupakan salah satu penyebab dari munculnya isu anak *undocumented*, untuk bisa melakukan administrasi terkait dokumen kependudukan orang tua dari anak tersebut harus dalam kondisi berdokumen juga, kenyataan yang ada di lapangan orang tua yang berstatus ilegal mengalami kesulitan dalam mengakses informasi ataupun akses menuju KBRI karena terdapat ketakutan tertangkap saat razia pekerja migran ilegal yang kerap dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Pada 2023 KBRI Kuala Lumpur telah menerbitkan 33.742 Surat Keterangan Status Kewarganegaraan dan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran.<sup>92</sup> Pihak KBRI terus melakukan upaya dalam mencatat anak-anak pekerja migran seperti kebijakan terkait surat keterangan kewarganegaraan, selain itu KBRI juga membuka layanan terkait pembuatan dokumen Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) untuk para pekerja migran Indonesia yang mengalami kendala pencatatan dokumen anak yang lahir, tentunya terdapat proses wawancara sebelum bisa mendapatkan dokumen tersebut

---

<sup>91</sup> Bella Rahma Safitri and Rosalinda Elsina Latumahina, "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 1591–1604.

<sup>92</sup> Erwina Rachmi Puspapertiwi and Sari Hardiyanto, "Ribuan WNI Di Malaysia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan, Apa Yang Terjadi?," *Kompas.com*, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/24/180000565/ribuan-wni-di-malaysia-terancam-kehilangan-kewarganegaraan-apa-yang-terjadi>.

yang dilakukan oleh pihak KBRI. Pihak KBRI terus berusaha untuk bisa menjangkau anak-anak dari pekerja migran dengan melakukan kunjungan rutin ke rumah tahanan migrasi agar bisa melakukan pengecekan terhadap PMI yang memiliki anak agar bisa segera di urus dokumen SBPK.<sup>93</sup>

### 2.3 Kebijakan Malaysia terhadap Anak Migran

Kebijakan Malaysia terhadap akses pendidikan dapat dilihat dalam *The Education Act 1996* yang menyatakan bahwa pendidikan dasar harus diberikan kepada semua anak tanpa memandang status kewarganegaraannya, tetapi dalam praktiknya anak-anak *undocumented* tidak bisa mengakses pendidikan formal karena terhalang persyaratan administratif yang mengharuskan anak yang mendaftar memiliki dokumen yang jelas dan berada dalam status imigran yang legal. Kebijakan imigrasi Malaysia yang ketat mempersulit anak-anak *undocumented* untuk bisa memperoleh akses pendidikan, walaupun Malaysia merupakan pihak dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Pendidikan formal yang tidak bisa diakses oleh anak *undocumented* memicu permasalahan baru, untuk bisa memberikan pendidikan KBRI melakukan kerja sama dengan komunitas diaspora dan lembaga kemasyarakatan untuk memberikan solusi agar anak-anak tersebut bisa memperoleh pendidikan.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Fathiyah Wardah, "Banyak Anak TKI Di Malaysia Tanpa Kewarganegaraan," VOA Indonesia, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-kewarganegaraan/5672383.html>.

<sup>94</sup> Debrita Yanieta Santoso, "Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Undocumented Yang Lahir Di Malaysia," *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 75, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32738>.

Malaysia menerapkan kebijakan yang ketat terkait kewarganegaraan, pencatatan kelahiran, dan status anak migran terutama yang *undocumented*. Kebijakan yang ketat menyebabkan dampak yang signifikan untuk anak yang berstatus *undocumented* dalam mengakses layanan publik seperti sekolah formal dan layanan kesehatan. Hukum Malaysia menganut *jus sanguinis* yang melihat garis keturunan sebagai penentu kewarganegaraan, seseorang dapat diakui menjadi warga Malaysia jika orang tua dari anak tersebut berkewarganegaraan Malaysia baik keduanya ataupun hanya salah satu.<sup>95</sup>

Pada tahun 2020 isu perlindungan terhadap anak *undocumented* menjadi perhatian organisasi kemasyarakatan dan lembaga internasional serta pemangku kepentingan. Di tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekan pemerintah Malaysia untuk segera membebaskan anak-anak pekerja migran yang terjaring razia dan anak-anak *undocumented* yang mengalami penahanan di imigrasi Malaysia. Razia dilakukan oleh otoritas imigrasi Malaysia pada 1 Februari 2023 dalam rangka menerapkan kebijakan Rekalibrasi Tenaga Kerja (RTK) 2.0 yang berisi tentang pengampunan atau pemulangan. Terdapat 103 pekerja migran Indonesia ilegal yang terjaring razia dengan rincian terdapat 36 laki-laki, 36 perempuan, dan 36 anak-anak.<sup>96</sup> Program RTK 2.0 yang dilakukan oleh otoritas imigrasi Malaysia telah mendata

---

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> Admin KPAI, "KPAI Mendesak Pemerintah Malaysia Membebaskan 36 Anak Pekerja Migran Tidak Berdokumen Yang Terkena Razia, Penangkapan, Dan Penahanan," 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-mendesak-pemerintah-malaysia-membebas-36-anak-pekerja-migran-tidak-berdokumen-yang-terkena-razia-penangkapan-dan-penahanan>.

418.649 dan 295.425 pekerja migran ilegal. Kebijakan recalibrasi sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan terdapat kebijakan lanjutan pada tahun 2023 hingga 31 Desember 2023.<sup>97</sup> kasus yang terjadi menunjukkan perlu adanya kebijakan yang lebih manusiawi dan mematuhi Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Malaysia sejak 1995.

#### **2.4 Sanggar Bimbingan**

Sanggar bimbingan dibentuk sebagai pusat pendidikan alternatif untuk anak-anak *undocumented*, dibuatnya sanggar bimbingan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dasar, literasi, dan penguatan karakter anak-anak yang mengalami kendala tidak bisa mengakses pendidikan formal di Malaysia. Dalam pembelajarannya sanggar bimbingan menyediakan kelas-kelas pendidikan dasar untuk membaca, menulis, berhitung yang sesuai dengan tingkatan dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Dengan dibuatnya sanggar bimbingan diharapkan bisa menjadi wadah untuk anak-anak dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat migran.<sup>98</sup>

Pendidikan untuk anak PMI yang ada di Semenanjung Malaysia hanya terdapat SIKL, sedangkan SIKL tidak bisa menampung semua anak pekerja migran. Daerah

---

<sup>97</sup> Aliyyah Bunga, "Malaysia Dan Kemnaker Resmikan RTK 2.0, Permudah TKI Lanjut Bekerja," kumparanNEWS, 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/malaysia-dan-kemnaker-resmikan-rtk-2-0-permudah-tki-lanjut-bekerja-1zjs68ge417>.

<sup>98</sup> Putri Baiti Jannati et al., "Pentingnya Pendidikan Bagi Stateless Children Di Sanggar Bimbingan Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI)," *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi 1*, no. 2 (2023): 263–71, <https://proceeding.unram.ac.id/index.php/Senmasosio/article/view/780>.

Sabah dan Sarawak lebih dahulu menyepakati kebijakan untuk bisa mendirikan komunitas pembelajaran dengan pemerintah Malaysia dalam bentuk *Community Learning Centre* (CLC) pada tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan anak pekerja migran yang berlokasi di ladang karena jarak yang jauh untuk bisa mengakses pendidikan.<sup>99</sup> Sedangkan untuk di daerah Semenanjung Malaysia hingga tahun 2019 belum terdapat pendidikan non formal untuk anak-anak *undocumented*. Sanggar bimbingan merupakan representasi perlindungan hak anak oleh Indonesia yang diharapkan bisa menjangkau anak pekerja migran terutama yang *undocumented*. Sanggar bimbingan dibentuk pertama kali pada tahun 2019 hasil kerja sama KBRI Kuala Lumpur dan lembaga kemasyarakatan sebagai solusi terhadap sulitnya akses pendidikan anak *undocumented* di Semenanjung Malaysia yang seharusnya merupakan hak yang bisa anak *undocumented* dapatkan sesuai dengan Konvensi Hak Anak.<sup>100</sup>

Sanggar bimbingan berada dibawah naungan langsung KBRI Kuala Lumpur serta melakukan koordinasi dengan SIKL perihal kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan modul pembelajaran. Selain itu terdapat kegiatan rutin yang dilakukan oleh guru-guru SIKL untuk mengajar dan memberikan arahan metode di sanggar bimbingan. Dalam hal Diplomasi, advokasi, dan pengelolaan administrasi sanggar dilakukan oleh KBRI bersama dengan komunitas diaspora, organisasi kemasyarakatan seperti

---

<sup>99</sup> Rusman, "Sekolah Anak-Anak TKI Di Sabah, Malaysia Dikunjungi Pegiat HAM AS," antaranews, 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1281421/sekolah-anak-anak-tki-di-sabahmalaysia-dikunjungi-pegiat-ham-as>.

<sup>100</sup> Nurrahman and Triwahyuni, "Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan."

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Peran Lembaga kemasyarakatan dan komunitas diaspora dalam memberikan bantuan untuk menjalankan sanggar bimbingan sangat penting karena membantu dalam banyak aspek seperti pencatatan calon murid baru, membantu menyediakan sarana dan prasarana di sanggar bimbingan, dan memperluas jangkauan anak-anak *undocumented*<sup>101</sup>. Berikut data jumlah sanggar bimbingan yang ada di Malaysia beserta jumlah siswa yang ada di tiap sanggar bimbingan.

**Tabel 2.2 Data Sanggar Bimbingan**

No	Wilayah	Nama Sanggar Bimbingan	Jumlah Murid
1	Kedah	SB Kulim	7
2	Pulau Pinang	SB AMI Penang	45
3	Pulau Pinang	SB Permai Penang	26
4	Pulau Pinang	SB AMI Al-Rahmah	12
5	Perak	SB Ipoh	8
6	Perak	SB Muallim	9
7	Pahang	ICC Pahang	23
8	Selangor	SB PPWNI Klang SD	202
9	Selangor	SB Sungai Mulia 5	187
10	Selangor	SB Sungai Buloh	129
11	Selangor	SB Ampang	71
12	Selangor	SB Kuala Langat	60
13	Selangor	SB AT-Tanzil Kajang	53
14	Selangor	SB Hulu Klang	52
15	Selangor	SB Hulu Langat	50
16	Selangor	SB AT-Tanzil KG Lindungan	37
17	Selangor	SB Subang Mewah	35
18	Selangor	SB At Tanzil Lembah Jaya	34
19	Selangor	SB Gombak Utara	32
20	Selangor	SB At-Tanzil Kayu Ara	32
21	Selangor	SB Wira Damai	32
22	Selangor	SB Kuang	9
23	Selangor	SB Puchong Perdana	16

<sup>101</sup> Ilham, "Muhammadiyah Malaysia Dirikan Sanggar Bimbingan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran," Muhammadiyah.or.id, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/2023/12/muhammadiyah-malaysia-dirikan-sanggar-bimbingan-bagi-anak-anak-pekerja-migran/>.

No	Wilayah	Nama Sanggar Bimbingan	Jumlah Murid
24	Selangor	SB Kampung Melayu Sg Buloh	13
25	Selangor	SB Sri Muda	26
26	Selangor	SB Al-Ikhlas Kg Sungai Pencala	25
27	Selangor	SB Intan Baiduri Selayang	25
28	Selangor	SB At Tanzil Padang Jawa	25
29	Selangor	SB Pelita Ilmu	23
30	Selangor	SB At Tanzil Putra Kajang	20
31	Selangor	SB Kg Gumut	16
32	Selangor	SB At-Tanzil Kg Bukit Lanchong	15
33	Selangor	SB At Tanzil Hicom	13
34	Selangor	SB Peradaban Sri Kembangan	8
35	Selangor	SB At Tanzil Alam Damai	8
36	Selangor	SB Beranang	8
37	Selangor	SB At Tanzil Setia Alam	5
38	Kuala Lumpur	SB Kampung Baru	80
39	Kuala Lumpur	SB PPWNI Klang SMP	59
40	Kuala Lumpur	SB Jalan Kebun	44
41	Kuala Lumpur	SB Annahdhoh	44
42	Kuala Lumpur	SB Sentul	33
43	Kuala Lumpur	SB Rawang	33
44	Kuala Lumpur	SB Kubu Gajah	33
45	Kuala Lumpur	SB Kg Pandan	32
46	Kuala Lumpur	SB Klang Gate	29
47	Kuala Lumpur	SB Pandan Jaya	29
48	Kuala Lumpur	SB Pandan Indah	24
49	Kuala Lumpur	SB At-Tanzil Jinjang	25
50	Kuala Lumpur	SB At-Tanzil Cheras	20
51	Kuala Lumpur	SB Klang Lama	20
52	Kuala Lumpur	SB Pantai Dalam	19
53	Kuala Lumpur	SB Elshaddai	19
54	Kuala Lumpur	SB At-Tanzil Serdang	17
55	Kuala Lumpur	SB Sungai Besi Indah	17
56	Kuala Lumpur	SB Segambut	13
57	Kuala Lumpur	SB At Tanzil Kota Damansara	12
58	Kuala Lumpur	SB Kelana Jaya	10
59	Kuala Lumpur	SB At Tanzil Seri Petaling	9
60	Kuala Lumpur	SB Kepong	51
61	Negeri Sembilan	ICC Negeri Sembilan	10
62	Johor	ICC Muar	29
63	Johor	ICC Ladang Kosma	11

No	Wilayah	Nama Sanggar Bimbingan	Jumlah Murid
64	Johor	ICC Al-Anshar Bahau	6

*Sumber: Pusat Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur*

Berdasarkan tabel di atas Wilayah Selangor merupakan daerah dengan jumlah sanggar bimbingan paling tinggi yaitu 30 dan terdapat 1261 siswa di dalamnya yang tersebar di setiap sanggar bimbingan. Tingginya angka sanggar bimbingan di daerah tersebut dikarenakan populasi dari pekerja migran Indonesia terbesar menempati daerah Selangor, sehingga membutuhkan fasilitas pendidikan untuk anak-anak mereka melalui sanggar bimbingan, selain itu Selangor merupakan wilayah industri dan pusat ekonomi di Malaysia.<sup>102</sup> Kuala Lumpur menduduki posisi kedua dengan jumlah sanggar bimbingan sebanyak 23 dan jumlah siswa 672 yang tersebar di kota tersebut, Kuala Lumpur sebagai ibukota negara Malaysia dengan kepadatan penduduk hingga 8.235 orang per km<sup>2</sup> tentunya menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang otomatis menarik minat pekerja migran.<sup>103</sup> Sanggar bimbingan muncul di lokasi yang padat penduduk seperti kota besar dan distrik industri dengan jumlah konsentrasi pekerja migran yang tinggi. Terdapat perbedaan jumlah sanggar bimbingan di tiap wilayah dipengaruhi oleh kebutuhan pendidikan non-formal dan jumlah anak pmi di daerah tersebut. Komunitas diaspora, Lembaga kemasyarakatan, dan pendonor memiliki pengaruh penting dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana. Oleh karena itu

---

<sup>102</sup> Hansel, "Penelitian Ini Mengungkap Rahasia Di Balik Rendahnya Adopsi BIM Di Selangor – Dan Ini Yang Harus Anda Ketahui!," diklatkerja.com, 2025, <https://www.diklatkerja.com/blog/penelitian-ini-mengungkap-rahasia-di-balik-rendahnya-adopsi-bim-di-selangor-dan-ini-yang-harus-anda-ketahui>.

<sup>103</sup> Virna P Setyorini, "DOSM Perkiraan Penduduk Malaysia Mencapai 33,4 Juta Di 2023," ANTARA News, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3660339/dosm-perkiraan-penduduk-malaysia-mencapai-334-juta-di-2023>.

setiap lokasi yang didalamnya terdapat koneksi kuat akan mempercepat perluasan sanggar bimbingan.

Pada wilayah Kedah SB Kulim menjadi satu-satunya sanggar bimbingan yang berdiri di wilayah tersebut, alasan dibalik minimnya sanggar bimbingan di wilayah Kedah karena wilayah tersebut bukan tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia, sehingga keberadaan PMI yang ada di wilayah tersebut rendah dibandingkan wilayah industri seperti Selangor atau pusat kota seperti Kuala Lumpur. PMI yang ada di Kedah bekerja di sektor perkebunan dan pertanian, Dengan jumlah PMI yang rendah maka permintaan akan sanggar bimbingan juga rendah.<sup>104</sup> Selain itu faktor yang mempengaruhi minimnya sanggar bimbingan di Kedah adalah keterbatasan aktor masyarakat dan prioritas wilayah sebaran sanggar bimbingan oleh KBRI Kuala Lumpur yang lebih mengutamakan wilayah-wilayah dengan sebaran anak PMI yang tinggi.

Pulau Pinang merupakan daerah yang memiliki konsentrasi tinggi PMI namun ukuran wilayah relatif kecil, PMI terkonsentrasi pada titik-titik tertentu seperti George Town, Seberang Perai, dan kawasan industri. Wilayah yang cenderung kecil memudahkan akses dan mobilitas, oleh karena itu keberadaan 3 sanggar bimbingan di Pulau Pinang menggunakan pendekatan yang berbasis konsentrasi dan kapasitas untuk

---

<sup>104</sup> Redaksi, "Nestapa Anak Buruh Migran Di Kedah: Puluhan Tahun Tak Bisa Mudik," The Stance, 2024, <https://thestance.id/nestapa-anak-buruh-migran-di-kedah-puluhan-tahun-tak-bisa-mudik>.

menjangkau jumlah anak yang lebih luas.<sup>105</sup> Untuk memperkuat efektifitas jumlah sanggar bimbingan yang minim, pada Pulau Pinang memperluas jejaring komunitas diaspora dan lembaga kemasyarakatan agar mampu meningkatkan fungsi dan kualitas sanggar bimbingan.

Perak memiliki wilayah geografis yang luas dan PMI yang berada di wilayah tersebut tidak terkonsentrasi pada satu kawasan. PMI yang ada di wilayah Perak tersebar di berbagai sektor seperti perkebunan dan konstruksi.<sup>106</sup> Dengan sebaran PMI yang tidak terdesentralisasi sanggar bimbingan yang ada di wilayah Perak memanfaatkan wilayah yang strategis seperti Ipoh agar akses untuk pendidikan non-formal bisa di jangkau dengan mudah.

PMI yang berada di daerah Pahang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, konstruksi, dan sektor informal. Kondisi geografis Pahang di dominasi oleh kawasan hutan, perkebunan, dan pertambangan.<sup>107</sup> Wilayah yang luas dengan persebaran PMI yang tidak terkonsentrasi pada satu kawasan serta keterbatasan akses transportasi publik mempersulit pengembangan sanggar bimbingan secara merata.

---

<sup>105</sup> edutalent.id, “Tantangan Anak Bangsa Di Sanggar Bimbingan Permai Penang Malaysia Dalam Menempuh Pendidikan,” Education Talent, 2024, <https://edutalent.id/tantangan-anak-bangsa-di-sanggar-bimbingan-permai-penang-malaysia-dalam-menempuh-pendidikan/>.

<sup>106</sup> Redaksi InfoSAWIT, “Ini 5 Wilayah Penghasil CPO Di Malaysia, Sabah Duduki Peringkat Pertama,” infosawit.com, 2023, <https://www.infosawit.com/2023/07/03/ini-5-wilayah-penghasil-cpo-di-malaysia-sabah-duduki-peringkat-pertama/amp/>.

<sup>107</sup> Jabatan Perangkaan Malaysia, “Environment Statistics Pahang” (Putrajaya, 2022), <https://www.dosm.gov.my/uploads/publications/20221018163134.pdf>.

Negeri Sembilan hanya memiliki satu sanggar bimbingan, hal ini dipengaruhi oleh letak wilayah Negeri Sembilan yang dekat dengan wilayah Selangor dan Kuala Lumpur sehingga Sebagian anak PMI lebih cenderung mengakses layanan pendidikan nonformal di Selangor, serta didukung oleh mudahnya akses transportasi lintas wilayah.<sup>108</sup> Kondisi yang terjadi pada Negeri Sembilan menjadikan wilayah yang terlayani secara tidak langsung dalam strategi pendidikan untuk anak PMI.

Johor merupakan daerah dengan pusat manufaktur serta merupakan wilayah strategis ekonomi. PMI yang berada di wilayah Johor memiliki mobilitas kerja tinggi dan sering berpindah tempat tinggal, sehingga jumlah anak yang menetap tidak stabil. Sanggar bimbingan yang tersebar di wilayah Johor fokus terhadap titik lokasi strategis yang bisa di jangkau beberapa distrik sekaligus.<sup>109</sup>

Sanggar bimbingan diisi oleh beberapa struktur seperti kepala sanggar bimbingan dan terdapat beberapa guru pengajar di dalamnya. Guru pengajar merupakan elemen terpenting dalam sanggar bimbingan karena berinteraksi secara langsung dengan siswa-siswi sanggar bimbingan, sebagian guru pengajar berasal dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang telah di bekali metode pengajaran dan kurikulum sehingga sanggar bimbingan yang ada di Malaysia tetap terkontrol di bawah

---

<sup>108</sup> Latifah et al., "Character Education Implementation For Children Of Indonesian Migrant Workers ( PMI ): Integrating Islamic Values And Nationalism Within The Pesantren Context," *International Journal of Community Services*, no. 2023 (2025): 141–46.

<sup>109</sup> Yuni Afifah, "FH UNAIR-KJRI Johor Bahru Bahas Dinamika Pelayanan Dan Perlindungan WNI Di Johor Bahru," fh.unair.ac.id, 2023, <https://fh.unair.ac.id/fh-unair-kjri-johor-bahru-bahas-dinamika-pelayanan-dan-perlindungan-wni-di-johor-bahru/#:~:text=Perlindungan terhadap pekerja migran itu,Koesrianti>.

naungan SIKL. Terdapat peran relawan serta mahasiswa yang melakukan KKN di sanggar bimbingan, dengan adanya relawan dan mahasiswa terdapat tenaga pengajar baru yang bisa mengisi celah-celah pembelajaran yang sebelumnya di karenakan oleh keterbatasan tenaga pengajar. Pengelolaan guru pengajar merupakan salah satu hal yang penting untuk tetap menjaga kualitas pendidikan dan keberlanjutan dari program sanggar bimbingan.<sup>110</sup>



---

<sup>110</sup> Monika Sutarsa, “Meningkatkan Semangat Kebangsaan Di Sanggar Bimbingan Sungai Buloh Malaysia,” *Journal of Community Service and Society Empowerment* 2, no. 03 (2024): 294–303, <https://doi.org/10.59653/jcsse.v2i03.904>.